

BAB VIII

PERANG SIPIL (1861-1865) DAN REKONSTRUKSI (1865-1877)

Setelah dilantik menjadi presiden pada bulan Maret 1861, **Abraham Lincoln**, mengakui kelemahan Partai Republikan sebagai institusi yang harus digunakannya untuk menyatukan bangsa. Hasil pemilu bulan November 1860 hanya menghasilkan 29 anggota Senate (*Senator*) dari kalangan Republikan sedangkan partai-partai lain menghasilkan 37 orang *Senator*. Di dalam parlemen (*House of Representative*) terpilih 108 Republikan sedangkan Partai lain (Demokrat dan Constitutional Unionist) menghasilkan 129. Namun demikian, pemisahan negara-negara bagian Selatan dari Union menyebabkan Partai Republikan menjadi mayoritas. Akan tetapi, Lincoln masih dihadapkan pada situasi sulit sebab anggota Mahkamah Agung yang berkuasa dalam membuat keputusan *Dread Scott* tahun 1857 menyatakan bahwa kebijaksanaan Partai Republikan yang anti perbudakan adalah inkonstitusional.

Upaya Lincoln Dalam Memelihara Union Amerika Serikat

Untuk menyatukan bangsa Amerika Serikat, Lincoln berusaha memanfaatkan semua kekuatan yang dimilikinya. Ketika negara-negara bagian Selatan dengan resmi menyatakan terpisah dari Union pada bulan Maret 1861 Lincoln menyatakan bahwa dirinya sebagai presiden akan menggunakan cara-cara kekerasan (militer) untuk mempertahankan kesatuan AS. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari partai Demokrat di Utara yang dipimpin oleh Stephen Douglas. Pada bulan April Lincoln segera mengumumkan akan dibentuknya pasukan sukarela untuk menambah pasukan yang ada, dan hanya akan digunakan untuk melawan negara-negara Selatan selama tiga bulan saja. Pernyataan perang yang dia lakukan bukan merupakan pelanggaran terhadap Hak Kongres untuk menyatakan perang sebab perang yang terjadi di AS adalah perang dalam negara bukan perang antar dua negara. Menurut pandangan ini setiap pemberontak dari Selatan akan dianggap sebagai penghianat bangsa dan bisa dihukum mati.

Pada bulan April sampai Juni, Lincoln melanggar Konstitusi dengan meningkatkan angkatan bersenjata dengan menggunakan uang negara (*Treasury*). Menurut undang-undang tindakan tersebut harus dilakukan oleh Kongres. Namun demikian, tindakan tersebut diratifikasi oleh Kongres dalam sidangnya bulan Juli 1861. Kongres berpikir bahwa Lincoln, atas nama Union AS, akan memenangkan perang tersebut sebab penduduk negara-negara bagian Utara jauh

lebih banyak dibandingkan dengan Selatan. Utara berpenduduk 20.700.000 dan selatan hanya 9.105.000. Warga hitam di Selatan berjumlah 3.654.000. Jumlah pabrik di Utara adalah 110.000 dan mempekerjakan 1 3000 000 pekerja sedangkan di Selatan hanya berjumlah 18.000 dan mempekerjakan 110.000 pekerja. Panjang jalan di utara adalah 22.000 mil dan selatan hanya 9.000 mil.

Dengan segala potensi yang dimilikinya, Lincoln segera melakukan serangan ke ibukota Konfederasi, Richmond di Virginia setelah dipindahkan dari Montgomery, dan dipimpin oleh Jenderal Irvin McDowell. Akan tetapi serangan tersebut dapat dipatahkan oleh Pasukan Konfederasi yang dipimpin oleh Jenderal Joseph E. Johnston. McDowell segera diganti oleh Jenderal George B McCellan yang sangat disiplin dalam memimpin pasukan. Untuk membangun pasukan yang kuat segera Lincoln merekrut wajib militer hingga terbentuk 2 juta orang pasukan, Melalui Undang-undang wajib militer yang dikeluarkan oleh Kongres tahun 1863 setiap negara bagian dan pejabat federal (dalam Union) berhak mengenakan wajib militer kepada warganya. Undang-undang baru tersebut menimbulkan kecemasan dan warga yang tidak menyetujuinya. Di New York, warga keturunan Irlandia yang miskin melakukan kerusuhan selama beberapa hari pada bulan Juli 1863 Mereka menuduh orang-orang kulit hitam sebagai penyebab dikeluarkannya kebijaksanaan tersebut. Beberapa orang terbunuh sebelum pasukan Unionis tiba dari Virginia. Kekhawatiran akan semakin meluasnya perang di Utara menyebabkan popularitas partai Republikan menurun pada beberapa negara bagian. Berhasilnya Partai ini menguasai Kongres tahun 1862 disebabkan militer menekan Partai Demokrat di Maryland, Kentucky dan Missouri dengan cara menangkap tokoh-tokoh demokrat yang pro-perbudakan.

Emancipation Proclamation

Pada bulan September 1862 Presiden Lincoln mengumumkan bahwa para budak yang dipekerjakan oleh warga kulit putih yang memberontak terhadap Union akan dinyatakan sebagai warga merdeka/bebas sejak Januari 1863. Pernyataan tersebut menimbulkan kemarahan negara-negara bagian yang menganut sistem tersebut. Mereka menganggap bahwa Lincoln dan pemerintah pusat tidak berhak mengatur masalah domestik negara bagian dalam urusan perbudakan. Atas desakan kaum *abolisionis* dan Republikan radikal, Lincoln mengeluarkan pernyataan emansipasi perbudakan berupa *The Emancipation Proclamation* pada bulan September 1862 dan mulai berlaku efektif bulan Januari 1863. Proklamasi emansipasi tersebut

hanya dapat dilaksanakan di negara-negara bagian yang telah ditaklukkan oleh Pasukan Union. Sedangkan di negara-negara bagian yang tidak menentang pemerintah pusat sistem tersebut masih dipertahankan. Menyusul proklamasi tersebut dan atas desakan kelompok radikal Republikan, Lincoln pada Januari 1863 merekrut sekitar 200.000 warga kulit hitam untuk menjadi Pasukan Union dan berperang melawan pasukan Konfederasi.

Presiden Abraham Lincoln menyadari bahwa *Emancipation Proclamation* tersebut merupakan pelanggaran yang diperlukan (*necessary violation*) terhadap Konstitusi yang dilakukan dalam keadaan darurat perang. Segera dia meminta Kongres untuk meratifikasi tindakannya menjadi konstitusional dan mendesak setiap negara bagian untuk melaksanakan keputusan tersebut. Partai Republik yang mendominasi Kongres mengeluarkan tigabelas amandemen berupa pembebasan perbudakan Akhirnya amandemen-mandemen tersebut menjadi bagian dari Konstitusi Amerika pada bulan Desember 1865 setelah kematian Lincoln. Konstitusi tersebut menjamin bahwa AS tidak akan lagi mengakui sistem perbudakan di negara-negara bagian. Tindakan emansipasi oleh Lincoln tersebut antara lain disebabkan adanya ancaman dari kelompok Republikan radikal yang akan memisahkan diri jika Lincoln tidak segera menyatakan pembebasan perbudakan.

Tindakan Lincoln dalam emansipasi tersebut juga dimaksudkan untuk membentuk citra positif dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Lincoln berusaha keras agar Inggris dan Perancis yang sangat berkepentingan dengan kawasan Amerika tidak membantu Konfederasi. Namun demikian, Napoleon III, pemimpin Perancis berusaha membantu Konfederasi dengan tujuan untuk melemahkan *Doktrin Presiden Monroe*. Perancis yang berambisi membentuk Imperium di Mexico dengan menempatkan seorang putra mallkota Austria, Maximilian menjadi kaisar boneka Perancis di sana, tidak dengan tegas membantu Konfederasi karena khawatir dengan Inggris yang menguasai Samudera Atlantik. Sedangkan Inggris yang juga masih ingin menanamkan pengaruhnya atas benua Amerika berpihak pada Konfederasi. Namun demikian, setelah ada tanda-tanda pasukan Konfederasi akan mengalami kekalahan dalam perang sipil Amerika tersebut, Inggris mulai mengurangi tanda peresahabatannya dengan pemerintah Konfederasi.

Dalam perang sipil yang berlangsung antara tahun 1861-1865 tersebut Negara-negara Konfederasi Selatan mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu mudah dipahami apabila mereka mudah dikalahkan oleh pasukan Union Lincoln. Ketika produksi

industri dan pertanian meningkat di Utara, negara-negara Selatan mengalami nasib sebaliknya. Mereka menderita akibat kekurangan bahan makanan. Warga sipil Richmond serta pasukan Konfederasi yang dipimpin oleh Jenderal Robert E. Lee mengalami kelaparan tahun 1864. Upaya meningkatkan pasukan melalui program wajib militer yang dikeluarkan melalui Kongres Konfederasi untuk sementara berhasil. Pada bulan Pebruari 1865 Kongres Konfederasi mengesahkan digunakannya budak sebagai pasukan sehingga pertempuran yang terjadi adalah antara warga kulit putih dan warga kulit hitam serta warga kulit hitam di Utara dan di Selatan. Selama empat tahun pertempuran dalam perang sipil, yang dianggap sebagai perang moderen pertama dalam sejarah dunia, tercatat korban jatuh pada Pasukan Union 360.000 dan Konfederasi 258.000. Akhirnya tahun 1865 pasukan Konfederasi dapat dikalahkan dan perang sipilpun berakhir. Presiden dan wapres Konfederasi, Jefferson Davis dan Alexander Stephen, ditangkap.

Rckonstruksi (1865-1877).

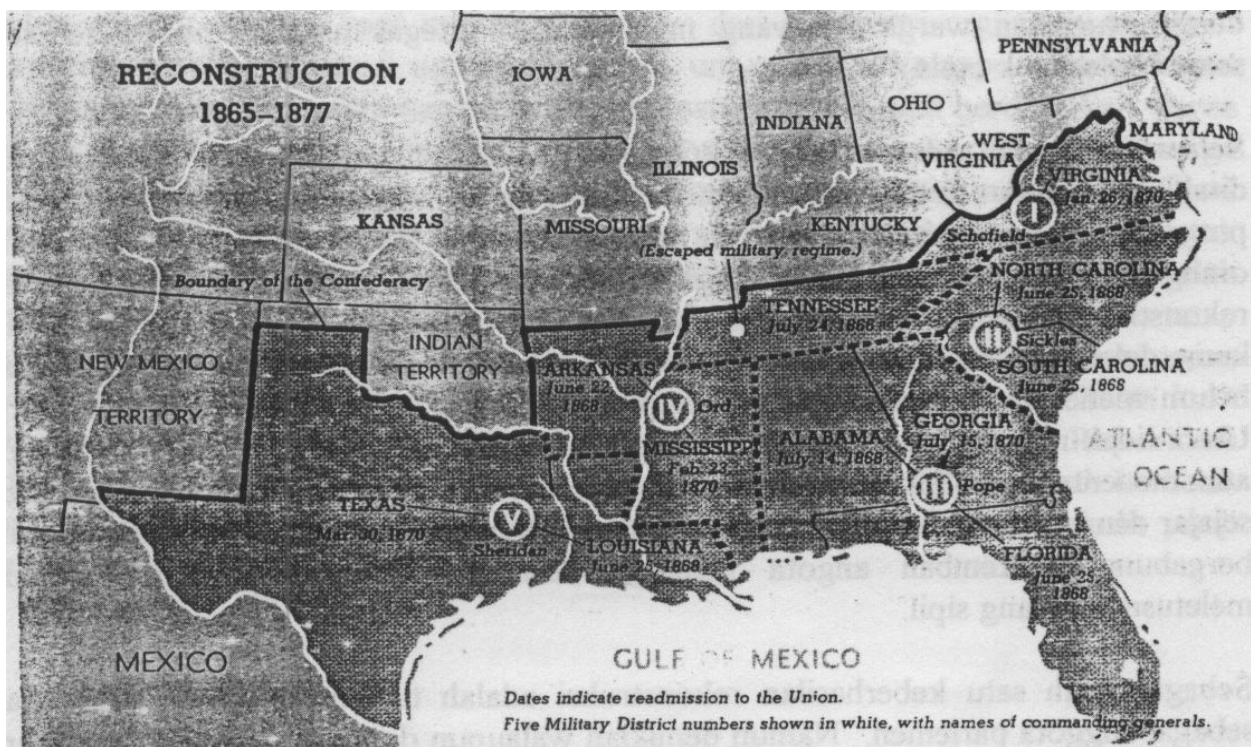
Pasukan Konfederasi dapat dikalahkan pada bulan April 1865, Lincoln terbunuh pada malam tanggal 14 April di Gedung Theater Ford di Washington D.C oleh seorang aktor bernama John Wilkes Booth. Booth yang berasal dari Maryland dan berkomplot dengan kelompok yang tidak suka dengan kebijaksanaan Lincoln yang dianggapnya sebagai tiran. Lincoln dituduh sebagai orang yang merusak kebebasan warga Amerika Serikat. Kelompok ini juga merencanakan membunuh wapres, Johnson dan beberapa anggota kabinet.

Wapres **Andrew Johnson**, seorang Demokrat dari Tennessee, yang tetap setia kepada Union merencanakan program rekonstruksi terhadap oposisi yang berasal dari Kelompok Republikan Radikal. Kelompok ini menentang sikap Lincoln yang yang membebaskan perbudakan dengan memberikan kompensasi kepada para pemilik budak. Kelompok Radikal menginginkan abolisi tanpa adanya kompensasi. Setelah Lincoln terbunuh, Johnson mengubah politik Rekonstruksi bukan semata-mata untuk "memperbaiki sikap" kelompok radikal melainkan memperbaiki tatanan sosial ekonomi dan politik di seluruh negeri yang tidak lagi mengakui perbudakan. Setelah program Rekonstruksi, seluruh perbudakan dibebaskan dan hak negara bagian untuk memisahkan diri dari Union dihapuskan. Negara-negara bagian Utara dapat mengontrol ekspansi ke arah Barat dan industrialisasi di kawasan itu dapat dilaksanakan tanpa adanya tantangan dari negara-negara Selatan Namun demikian, kelompok Republikan Radikal masih menuntut agar program rekonstruksi tersebut meliputi semua aspek kehidupan sosial,

ekonomi dan politik di negara-negara Selatan. untuk menjaminnya tertanamnya nilai-nilai Utara di seluruh negeri.

Kelompok Republikan Radikal juga menghendaki agar kelompok aristokrat yang bergerak di sektor perkebunan di negara-negara Selatan dihapuskan dengan cara membebaskan para buruh serta mengakui budak negro sebagai warga negara (citizen). Sedangkan Presiden Johnson yang tidak suka dengan orang-orang kulit hitam tidak percaya bahwa orang-orang negro dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta bisa sejajar dengan warga kulit putih. Bahkan dia menganjurkan kepada negara-negara Selatan untuk tidak meratifikasi Amendemen Empatbelas yang dikeluarkan oleh Kelompok Republikan Radikal yang berisi antara lain bahwa "semua orang yang lahir dan bernaturalisasi di Amerika Serikat adalah warga negara Amerika Serikat dan Negro Bagian dimana mereka tinggal". Kelompok Republikan Radikal yang memperoleh suara mayoritas dalam Kongres tahun 1866 dapat membatalkan veto Presiden Johnson terhadap *Civil Right Act* dan *Freetbnen 's Bureau Act* yang antara lain mengakui hak-hak warga kulit hitam sebagai warga negara.

Peta AS pada masa rekonstruksi 1865-1877:



Pada tanggal 2 Maret 1867 Partai Republikan yang telah menguasai dua pertiga kangsgotaan Senat dan House of Representative dapat mengeluarkan *Reconstruction Act* yang antara lain berisi penghapusan negara-negara bagian dalam Konfederasi, kecuali Tennessee, dan membagi kesepuluh negara bagian tersebut kedalam lima distrik militer yang masing-masing berada dibawah pengawasan seorang Jenderal militer. Jenderal tersebut bertanggungjawab terhadap diberikannya hak suara kulit putih dan kulit hitam, dihapuskannya pemerintahan Konfederasi dan dibentuknya konstitusi baru negara bagian. Para Jenderal di lima distrik militer juga bertanggungjawab terhadap terselenggaranya ratifikasi *Amandemen Empaibelas* dan bergabungnya kembali negara-negara bagian tersebut ke dalam Union. Pada bulan Juni 1868 Arkansas bergabung dengan Union disusul dengan negara-negara bagian lainnya dan diakhiri dengan Georgia tahun 1870. Sedangkan Tennessee sudah meratifikasi amandemen tersebut setelah pemerintahan negara bagian tersebut berada di bawah kontrol Partai Republikan.

Dengan demikian, program rekonstruksi lebih banyak dilakukan oleh parlemen AS yang dikuasai oleh Partai Republikan, menunjukkan berkuasanya Pemerintahan Parlementer. Setelah tidak mampu mempengaruhi partai ini, Presiden Johnson mencoba menunjukkan kekuasaannya dengan cara memecat Menteri Perang, Edwin M. Stanson. House of Representative, yang didominasi oleh Partai Republikan, segera menentang kebijaksanaan Johnson dengan *impeachment* (dakwaan) bahwa Johnson bersalah dan oleh karena itu dia harus dihentikan dari jabatannya sebagai presiden. *Impeachment* yang hampir sama dilakukan oleh Senate terhadap Presiden Bill Clinton karena pelecehan seksual terhadap mantan pekerja Gedung Putih Monica Lewinsky tahun 1998, telah mengakhiri karier Presiden Johnson yang tidak reformis dengan tuntutan warga AS yang menghendaki ditegakkannya *equality* terhadap semua kelompok etnis.

Selama program rekonstruksi (1865-1877) negara-negara bagian Selatan yang ditaldukkan harus menyesuaikan diri dengan tertib sosial ekonomi baru. Selama program rekonstruksi, Senate masih memperdebatkan mengenai status sosial politik orang-orang negro di negara-negara Selatan. Bagi mantan budak, program rekonstruksi memberikan mereka kesempatan untuk menikmati kebebasan dan kemerdekaan. Sebaliknya, mantan pemilik budak di negara-negara Selatan masih belum menerima konsep equality dengan para budak. Sedangkan sebagian -warga Utara tidak menunjukkan sikap yang tegas apakah akan mengakui hak warga negro atau menentangnya. Sikap ambivalensi tersebut menyulitkan diterimanya warga negro sejajar dengan warga kulit putih. Dalam pengertian yang praktis, rekonstruksi berarti

bergabungnya kembali anggota keluarga budak yang terpecah-pecah sebelum meletusnya perang sipil.

Sebagai salah satu keberhasilan rekonstruksi adalah tampilnya warga kulit hitam sebagai anggota parlemen. Namun demikian walaupun di negara-negara bagian yang mayoritas penduduknya warga kulit hitam, orang-orang negro tidak berhasil menguasai mayoritas anggota parlemen. Di Carolina Selatan, Mississippi dan Louisiana yang lebih dari lima puluh persen penduduknya berkulit hitam, parlemen tetap dikuasai orang kulit putih. Hanya di Carolina Selatan warga kulit hitam menguasai majelis rendah parlemen serta anggota senate. Di negara-negara tersebut tidak terdapat gubernur dan anggota badan yudikatif dikuasai oleh warga kulit hitam.

Setelah rekonstruksi, kebebasan terbesar diperoleh warga kulit hitam dalam bidang agama. Mereka berhasil membangun 10.000 gereja yang keanggotaannya terbatas pada warga kulit hitam. Para menteri dan anggota Kongres kulit hitam bersama mengembangkan *sense of independence* atau rasa kebebasan serta ketrampilan baru dalam mengembangkan institusi sosial, Orang-orang negro yang pernah dipaksa untuk bergabung dengan *Gereja Baptis* dan *Methodist dan Presbyterian* di Selatan selama sistem perbudakan segera menyatakan keluar dari keanggotaan gereja tersebut Sekitar 250.000 mantan budak segera bergabung dengan Gereja Methodist Utara yang dipimpin oleh orang-orang kulit putih, 400.000 lainnya bergabung dengan Gereja Methodist Episcopal Afrika, dan sekitar 200.000 lainnya bergabung dengan Gereja Methodist Episcopal Afrika Zion. Sedangkan sebagian besar warga hitam lainnya membentuk gereja tersendiri dalam Gereja Baptis kulit hitam dengan tujuan mengembangkan rasa bangsa sebagai warga kulit hitam dan tidak mau tergantung pada warga kulit putih, sekalipun dalam urusan agama.

Untuk meningkatkan status sosialnya, orang-orang Negro sangat berkepentingan dengan peningkatan kehidupan ekonomi mereka. Namun demikian, mereka masih menghadapi kesulitan modal untuk mendapatkan lahan-lahan pertanian. Cara yang paling praktis untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menjadi penyewa tanah dari para pemilik tanah, yang mungkin bekas pemilik budak, dengan setengah harga. Warga negro yang pernah dipersoalkan hak pilihnya karena tidak memiliki pendidikan yang seimbang dengan warga kulit putih memandang pendidikan merupakan sarana untuk meraih sukses ekonomi dan politik, segera memasuki sekolah-sekolah. Mereka juga mendapat bantuan dari organisasi-organisasi gereja di negara-

negara bagian Utara untuk masuk ke universitas. Walaupun *Amandemen Kelimabelas* melarang setiap negara bagian mensyaratkan hak pilih berdasarkan warna kulit dan kelompok etnis, sebagian warga kulit putih masih memperlakukan warga kulit hitam sebagai warga kelas dua. Antara tahun 1880 dan 1920, melalui *Jim Crow Laws*, warga kulit hitam masih dihadapkan pada perlakuan kasar dan dicegah untuk menggunakan hak suaranya agar mereka terpisah dari warga kulit putih. Setelah warga negara-negara bagian Utara tidak banyak membantu, warga kulit hitam tetap tidak memperoleh status equal secara hukum dalam hak pilih di negara-negara bagian Selatan sampai tahun 1960-an. Perjuangan untuk menghapuskan sistem kasta kulit putih seperti dituntut oleh Thaddeus Stevens, serta para pemimpin Republikan Radikal dan banyak pemimpin kulit hitam selama rekonstruksi tidak pernah berhasil. Amerika Serikat tetap merupakan negara yang menempatkan supremasi kulit putih atas kulit berwarga, bahkan sampai sekarang.